

BAB 2

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

2.1. GAMBARAN POKOK WILAYAH NASIONAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar diseluruh wilayah Nusantara. Kondisi geografis dan perkembangan sosial ekonomi di Indonesia telah menyebabkan perkembangan pembangunan di berbagai daerah Indonesia tidak merata. Kondisi ini mengakibatkan kawasan timur Indonesia tertinggal dibanding wilayah bagian barat, terutama pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Pulau Jawa yang luar wilayahnya sebesar 6% dari wilayah Indonesia dihuni oleh lebih dari 60% penduduk seluruh Indonesia. Sehingga masalah kepadatan penduduk, sarana prasarana wilayah, menjadi masalah yang kompleks terutama di wilayah perkotaan di Jawa seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, kemiskinan dan perumahan. Kondisi ini juga didukung adanya berbagai kegiatan industri yang kebanyakan berada di pulau Jawa, sedangkan kegiatan ekonomi primer seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan banyak berlokasi di luar pulau Jawa, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya (Papua).

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu pusat kebudayaan di Indonesia telah berkembang menjadi daerah pusat pendidikan dan daerah tujuan wisata (DTW) internasional kedua setelah Bali. Para pelajar dan mahasiswa Yogyakarta berasal dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga Yogyakarta menjadi miniatur berbagai budaya Indonesia. Dari aspek wisata, wisatawan nusantara (Wisnus) berkunjung ke DIY terutama melalui jalan darat. Sedangkan wisatawan mancanegara (wisman), baik dari darat dan udara, datang ke DIY terutama melalui Jakarta dan Bali. Sebagian wisman secara langsung datang melalui jalur penerbangan Kuala Lumpur – Yogyakarta.

Sebagai dampak kegiatan pendidikan dan pariwisata DIY, hasil industri kerajinan dari wilayah ini diminati baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun jalur distribusi utama industri kerajinan DIY adalah Semarang, Surabaya, Bali dan Jakarta. Sehingga kegiatan utama DIY yaitu pendidikan dan pariwisata mengakibatkan volume arus pendumpan dan barang dari dan ke DIY terutama melalui darat dan udara baik untuk transportasi wilayah nasional maupun internasional. Adapun posisi Indonesia di antara benua Asia dan Australia dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Indonesia Diantara Asia dan Australia

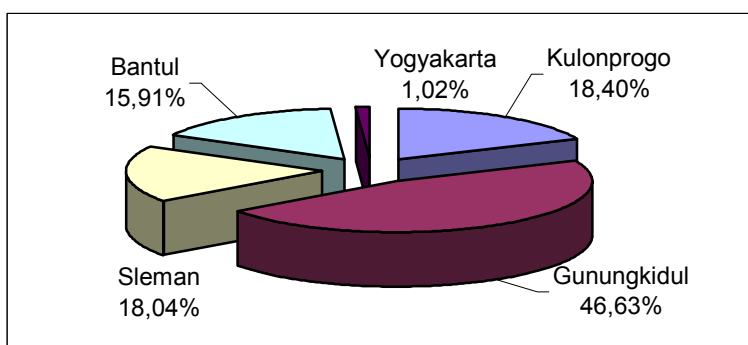
2.2. GAMBARAN POKOK WILAYAH DIY

2.1.1. Kondisi Umum Wilayah

A. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Propinsi DIY yang secara geografis terletak antara 7°33' – 8°12' Lintang Selatan dan 111°00' – 110°50' Bujur Timur tercatat memiliki luas wilayah sebesar 3.185,80 km². Batas wilayah Propinsi DIY adalah Lautan Indonesia di bagian selatan, Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut, Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara, Kabupaten Purworejo di sebelah Barat, dan Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut. Keseluruhan kabupaten yang berbatasan dengan Propinsi DIY tersebut berada dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Secara administratif, wilayah Propinsi DIY terbagi atas 4 (empat) kabupaten yaitu Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan 1 (satu) kota yaitu Yogyakarta. Diantara kelima wilayah administrasi tersebut, Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar (= 46,63%); diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten



Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dengan masing-masing prosentase luas wilayah adalah 18,40%; 18,04%; 15,91% dan 1,02% (lihat Gambar 2.2, Tabel 2.1 dan Gambar 2.3).

Gambar 2. 2.Pembagian Wilayah Administratif DIY

Tabel 2. 1. Wilayah Administrasi Propinsi DIY

No	Kabupaten	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km ²)	Prosentase (%)
1	Kulonprogo	Wates	12	88	586,27	18,4
2	Bantul	Bantul	17	75	506,85	15,9
3	Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.485,36	46,6
4	Sleman	Sleman	17	86	574,82	18,0
5	Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	32,5	1,0
	Propinsi DIY		78	438	3.185,80	100,0

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka, 2002

B. Kependudukan

Berdasarkan data statistik, penduduk DIY pada tahun 2002 mencapai 3.360.348 jiwa, jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,97% dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.327.954 jiwa. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut terbagi dalam sebesar 761.843 rumah tangga. Dilihat dari sebaran menurut kabupaten/kota sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2 dan Gambar 2.4, terlihat bahwa sebaran penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Sleman (sebesar 869.586 jiwa); diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang masing-masing mencapai sebesar 786.617 jiwa dan 749.875 jiwa. Sedangkan sebaran penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta dengan masing-masing jumlah penduduk mencapai 446.843 jiwa dan 507.427 jiwa.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Propinsi DIY

Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	Penduduk			Pertumbuhan (%)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Kulonprogo	92.634	218.248	228.595	446.843	0,68
Bantul	194.063	385.156	401.461	786.617	0,83
Gunung Kidul	155.039	367.307	382.568	749.875	0,46
Sleman	218.438	430.178	439.408	869.586	1,52
Yogyakarta	101.669	261.723	245.704	507.427	1,29
Propinsi DIY	761.843	1.662.612	1.697.736	3.360.348	0,97
2001	745.216	1.643.965	1.683.989	3.327.954	1,00
2000	729.868	1.629.136	1.665.991	3.295.127	0,92
1999	713.337	1.613.718	1.651.224	3.264.942	0,84
1998	698.787	1.599.377	1.638.251	3.237.628	0,75
1997	685.180	1.586.596	1.626.906	3.213.502	0,88
1996	671.638	1.572.133	1.613.251	3.185.384	0,98
1995	655.316	1.555.982	1.598.283	3.154.265	0,95

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka, 2002

Sementara itu bila kajian kependudukan didasarkan atas tingkat kepadatan wilayah maka sesuai data statistik tahun 2002 rata-rata tingkat kepadatan penduduk yang mendiami wilayah DIY adalah sebesar 1.054,79 jiwa tiap km². Jika ditinjau per kabupaten, Kota Yogyakarta merupakan daerah terpadat dengan 15.613,14 jiwa tiap km², sedangkan Kabupaten Gunung Kidul adalah kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu hanya 504,84 jiwa tiap km² (lihat Gambar 2.5). Bila dicermati dari Tabel 2.3 angka-angka kepadatan tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan ini tentu saja perlu diantisipasi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai khususnya di wilayah Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman.

Gambar 2. 3. Wilayah Administrasi Propinsi DIY

Gambar 2. 4. Populasi Penduduk Propinsi DIY

Gambar 2. 5. Kepadatan Penduduk Propinsi DIY menurut Kabupaten/Kota

Tabel 2. 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi DIY

Kabupaten/ Kota	Luas		Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)				
	Km	%	1998	1999	2000	2001	2002
Kulonprogo	586,28	18,40	742	747	752	757	762,17
Bantul	506,85	15,91	1.501	1.513	1.525	1.539	1551,97
Gunungkidul	1.485,36	46,62	496	498	500	503	504,84
Sleman	574,82	18,04	1.434	1.450	1.468	1.490	1.512,80
Yogyakarta	32,5	1,02	17.799	14.988	15.197	15.414	15.613,14
Propinsi DIY	3.185,81	100,00	1.016	1.025	1.034	1.045	1.054,79

Sumber: *Propinsi DIY dalam Angka 2002*

C. Perekonomian

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah berakibat pada melemahnya kegiatan perekonomian di tanah air tak terkecuali di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan PDRB harga konstan tahun 1993 diketahui bahwa pada tahun 2002 PDRB DIY mengalami kenaikan sebesar 3,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan bila dicermati berdasarkan nilai PDRB perkapita maka pada tahun 2002 diketahui adanya kenaikan sebesar 2,64% dibandingkan PDRB perkapita tahun 2001 (lihat Tabel 2.4).

Tabel 2. 4. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

No	Lapangan Usaha	PDRB (juta Rupiah)		Distribusi (%)	
		2001	2002	2001	2002
1	Pertanian	886.990	835.988	17,11	15,60
2	Pertambangan dan Penggalian	60.917	61.018	1,18	1,14
3	Industri Pengolahan	677.486	705.157	13,07	13,16
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	39.004	40.547	0,75	0,76
5	Bangunan	412.355	455.046	7,96	8,49
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	846.634	863.124	16,34	16,11
7	Pengangkutan dan Komunikasi	672.922	706.728	12,98	13,19
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	543.471	603.398	10,49	11,26
9	Jasa-jasa	1.042.764	1.086.665	20,12	20,28
	Produk Domestik Reg. Bruto	5.182.544	5.357.669		
	PDRB per kapita	1.648.329	1.691.877		

Sumber : *Propinsi DIY Dalam Angka 2002*

Dilihat dari kontribusi yang diberikan per sektor lapangan usaha (Tabel 2.5 dan Gambar 2.6) terlihat bahwa pada tahun 2002 Kabupaten Sleman memberikan kontribusi terbesar sebanyak 29,82% terhadap PDRB Propinsi DIY, diikuti oleh Kota Yogyakarta dengan 27,62%. Dengan demikian terlihat bahwa hampir 60% PDRB DIY disumbangkan

oleh kedua wilayah tersebut. Dari kesembilan lapangan usaha yang ada, sektor jasa-jasa merupakan penyumbang terbesar PDRB DIY dengan prosentase sebesar 20,28% diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan 17,43%. Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian dengan masing-masing prosentase sebesar 0,69% dan 0,76%.

Tabel 2. 5. Distribusi PDRB Dilihat dari Kabupaten/Kota dan Sektor Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota					DIY
		Sleman	Bantul	KulonProgo	GunungKidul	Yogyakarta	
1	Pertanian	4,20	3,67	2,06	6,58	0,21	16,73
2	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,22	0,07	0,34	0,00	0,76
3	Industri Pengolahan	4,95	2,58	0,32	2,26	3,21	13,31
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,14	0,09	0,04	0,05	0,36	0,69
5	Bangunan	3,08	1,71	0,47	1,44	1,61	8,31
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,54	2,96	1,09	2,04	5,81	17,43
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,25	1,39	0,83	1,82	4,62	11,91
8	Keu. Persew. & Jasa Perusahaan	3,49	1,16	0,52	0,81	4,61	10,58
9	Jasa-jasa	5,05	3,41	1,61	3,02	7,19	20,28
	PDRB	29,82	17,20	7,01	18,35	27,62	100,00

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka 2002, data diolah

D. Kinerja Ekspor-Impor

Perkembangan ekspor Propinsi DIY selama lima tahun terakhir cukup berfluktuatif, baik nilai, volume, jenis komoditi, negara tujuan serta pelaku ekspornya (lihat Tabel 2.6).

Tabel 2. 6. Perkembangan Ekspor DIY

Tahun	Vol.	%	Nilai	%	Kom	%	Neg	%	Eks.	%
1999	36,22	10,19	91,64	-1,63	74	2,78	71	12,70	155	29,16
2000	35,84	-1,05	96,87	5,71	74	0,00	72	1,41	157	1,29
2001	36,89	2,93	101,03	4,29	74	0,00	74	2,78	196	24,84
2002	37,23	0,92	110,14	9,17	78	5,41	90	21,62	197	0,51
2003	36,64	-4,27	115,32	4,70	72	-7,69	90	0,00	260	31,98

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi DIY

Volume (juta kg); Nilai : juta US\$

Dilihat dari negara tujuan ekspor, dari sebanyak kurang lebih 70-90 negara yang menjadi tujuan eksport maka yang utama hanyalah 19 negara (hampir 90%) dengan negara Amerika sebagai tujuan utama (lihat Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 serta Gambar 2.7 sampai dengan Gambar 2.9).

Tabel 2. 7. Volume dan Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Negara Tujuan

Negara	Volume (Juta Kg)			Nilai (Juta USS)		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Amerika serikat	10,45	9,4	8,27	45,34	47,87	49,83
Jepang	2,28	2,56	1,85	6,94	4,65	6,02
Australia	3,79	3,7	3,32	3,23	4,16	3,65
Belanda	2,78	2,85	2,27	4,26	4,09	3,71
Italia	1,14	1,52	1,91	6,78	6,64	8,35
Perancis	4,77	4,65	4,54	6,69	7,37	7,81
Inggris	1,74	1,78	1,83	2,9	4,06	3,63
Jerman	0,61	0,81	0,81	2,57	5,11	5,45
Denmark	0,57	0,61	0,61	1,31	1,49	1,36
Spanyol	1,31	1,49	1,91	2,81	3,53	4,19
Hongkong	0,27	0,8	0,73	2,39	4,51	3,96
Kanada	0,56	0,62	0,43	1,66	2,01	0,88
Korea Selatan	0,14	0,18	0,24	1,24	1,08	1,13
Singapura	0,51	0,55	0,25	1,46	2,03	0,86
Belgia	0,55	0,86	0,85	0,94	1,8	1,49
Taiwan	0,9	0,49	0,31	0,92	0,79	0,66
UE. Arab	0,5	0,77	1,07	0,98	1,38	1,96
Malaysia	0,41	0,38	0,48	0,4	0,94	1,99
India	0,03	0,03	0,03	0,73	0,41	0,41
Lainnya	3,58	3,18	3,87	7,48	6,22	7,98
Total	36,89	37,23	36,64	101,03	110,14	115,32

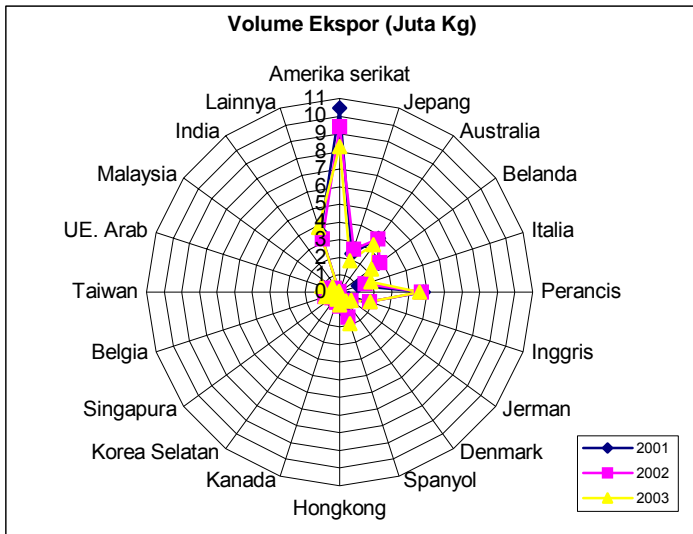
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi DIY

Tabel 2. 8. Volume dan Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Pelabuhan Utama

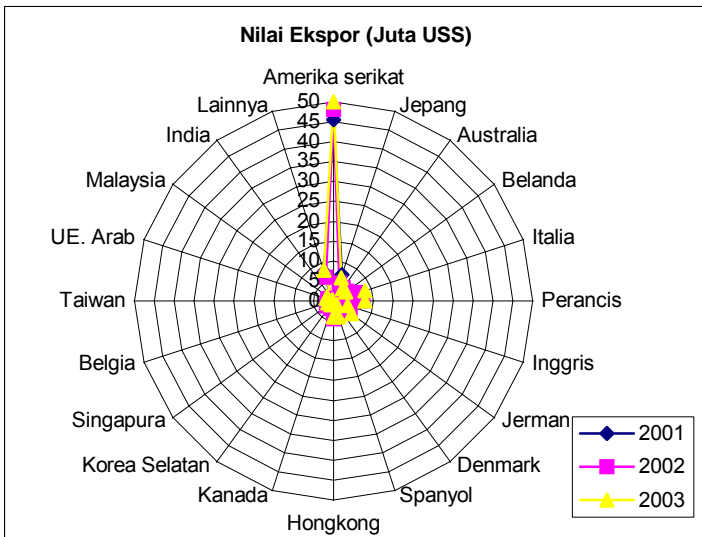
Pelabuhan Utama	Volume (Juta Kg)			Nilai (Juta USS)		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Tanjung Emas	33,69	34,25	32,52	68,51	71,81	66,22
Tanjung Perak	1,66	0,87	0,65	3,52	3,46	2,43
Tanjung Priok	0,76	1,15	1,14	12,79	11,89	17,43
Soekarno Hatta	0,45	0,52	0,89	12,75	14,47	20,05
Ngurah Rai	0,17	0,26	0,3	2,13	3,97	5,12
Adisutjipto	0,13	0,11	0,05	0,91	2,33	0,89
Juanda	0	0,04	0,03	0,1	0,66	3,01
Adi Sumarno	0	0,03	0	0,02	1,53	0
Lainnya	0,03	0	1,06	0,3	0,02	0,17

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi DIY

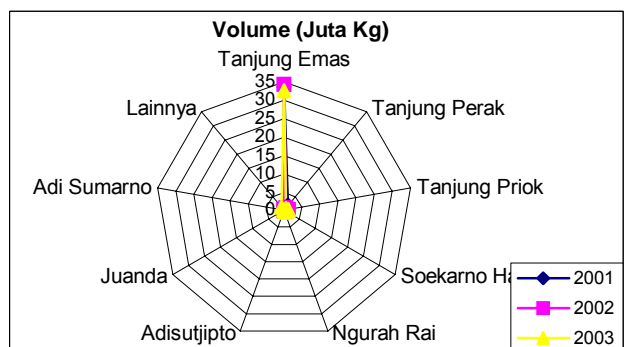
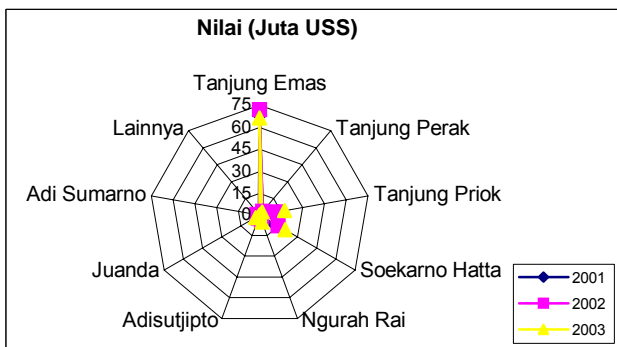
Gambar 2. 6. Distribusi PDRB Propinsi DIY



Gambar 2. 7. Volume Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Negara Tujuan



Gambar 2. 8. Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Negara Tujuan



Gambar 2. 9. Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Pelabuhan Utama

Berbeda dengan kinerja ekspor, perkembangan impor di propinsi DIY relatif lebih sulit. Kesulitan ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang diantaranya adalah karena baik pelabuhan bongkar, pelaku impor bahkan kantor pusat umumnya berada di luar DIY.

Pada tahun 2002, tercatat realisasi impor Propinsi DIY mengalami penurunan nilai namun walaupun bila dilihat dari volumenya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Tabel 2.9).

Tabel 2. 9. Volume dan Nilai Impor di Propinsi DIY Berdasar Negara Asal

No	Negara	Volume (Juta Kg)			Nilai (Juta USS)		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
1	Jerman	0.04	0.06	0.01	0.35	0.21	0.05
2	Italia	0.35	0.21	0.16	1.05	0.62	0.45
3	Jepang	0.11	0.10	0.10	12.17	1.25	29.67
4	Singapura	0.45	0.89	0.76	1.37	1.33	1.12
5	Hongkong	0.00	0.02	-	0.03	0.10	-
6	Australia	0.79	1.48	0.48	1.50	1.99	0.77
7	Belgia	0.18	0.00	0.00	2.17	0.06	0.08
8	Korea Selatan	0.00	0.19	0.10	0.00	1.41	0.04
9	RRC	0.61	0.32	1.36	0.92	0.67	2.02
10	USA	1.77	1.64	1.55	2.63	2.02	2.21
11	Swiss	0.02	0.00	0.02	0.40	0.05	0.46
12	Taiwan	0.00	0.28	0.00	0.04	0.82	0.04
13	Malaysia	0.00	0.00	-	0.03	0.66	-
14	New Zaeland	-	0.40	1.88	-	0.09	3.57
15	India	-	0.01	0.00	-	0.02	0.00
16	Genoa	-	0.01	-	-	0.02	-
17	Belanda	-	0.00	-	-	0.00	-
18	Hungaria	-	0.00	-	-	0.02	-
19	Spanyol	-	-	0.00	-	-	0.00
20	Perancis	-	-	0.00	-	-	0.00
21	Austria	-	-	0.03	-	-	0.07
	Total	4.32	5.58	6.45	22.67	11.32	40.55

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi DIY

2.2.2. Perkembangan Internal Wilayah DIY

Dalam membahas perkembangan Internal DIY akan disampaikan permasalahan yang berkaitan dengan kawasan prioritas propinsi DIY. Sejumlah perkembangan internal yang perlu diperhatikan adalah kawasan prioritas pembangunan seperti kawasan tumbuh cepat, kawasan penunjang sektor strategis, kawasan perbatasan, serta kawasan pantai potensial.

A. Struktur Tata Ruang Wilayah DIY

Rencana struktur tata ruang wilayah DIY mencakup sistem kota-kota dan sistem pelayanannya yang dapat dilihat pada Gambar 2.10. Struktur tata ruang wilayah DIY mencakup sistem kota-kota dan sistem pelayanannya. Adapun perkembangan internal wilayah DIY dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wilayah perkotaan Yogyakarta yang cukup pesat mencakup kota Yogyakarta dan sejumlah kecamatan disekitarnya seperti Kasihan, Sewon, Banguntapan, Depok, Ngemplak, Ngaglik, Mlati, dan Gamping. Sedangkan zona inti perkotaan Yogyakarta adalah kawasan perkotaan Yogyakarta yang berada di dalam ring road. Wilayah perkotaan Yogyakarta diluar ring road berkembang sebagai sub kawasan perkotaan (*sub-urban*).
- 2) Perkembangan wilayah DIY bagian barat berpusat di dua kota yaitu Wates dan Nanggulan.
- 3) Pertumbuhan wilayah DIY dibagian utara berpusat di wilayah Sleman dan Godean.
- 4) Pertumbuhan daerah bagian selatan mencakup kota Bantul, Srandakan, Imogiri dan piyungan.
- 5) Pertumbuhan daerah bagian timur berpusat di kota Wonosari.
- 6) Pertumbuhan kota perbatasan terdiri dari kota Tempel, Ngawen, Rongkop, Temon dan Prambanan.

B. Peruntukan Ruang/ Lahan

Sejak tahun 1997 hingga tahun 2000, terjadi perubahan tata guna lahan di DIY dari persawahan (176,54 Ha), tegalan (55,87 Ha), dan tanah terbuka (1,22 Ha) menjadi permukiman (218,63 Ha) dan industri (15 Ha). Perubahan lahan dari persawahan menjadi permukiman paling banyak terjadi di Kabupaten Sleman, dan diikuti oleh Bantul dan Gunung Kidul (Bappeda DIY, 2002). Luas dan rencana pemanfaatan lahan di DIY dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.11 berikut.

Tabel 2. 10. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Propinsi DIY

No	Jenis Pemanfaatan	Luas (Ha)	%
1	Kawasan lindung bawahan <ul style="list-style-type: none">• Kawasan lindung• Kawasan resapan air	<ul style="list-style-type: none">• 45.159• 23.216	<ul style="list-style-type: none">• 14,18• 7,29
2	Kawasan lindung setempat, seperti pantai, sungai, danau/waduk dan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none">• 1.968	<ul style="list-style-type: none">• 0,62
3	Kawasan suaka alam termasuk cagar alam dan hutan lindung/taman hutan raya	<ul style="list-style-type: none">• 68.669	<ul style="list-style-type: none">• 21,56
4	Kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none">• 11.290	<ul style="list-style-type: none">• 3,53

Gambar 2. 10. Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah DIY

(Peta R2 dalam Laporan Akhir Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Gambar 2. 11. Rencana Pemanfaatan Lahan di DIY

(Peta R1 dalam buku Laporan Akhir Peninjauan Kembali RTRW Propinsi DIY tahun 2002.)

Tabel 2. 10. (lanjutan)

No	Jenis Pemanfaatan	Luas (Ha)	%
5	Kawasan budidaya		
	• Pertanian lahan basah	• 60.677	• 19,05
	• Pertanian lahan kering	• 67.165	• 21,08
	• Kawasan pertambangan	• 11.352	• 3,57
	• Kawasan permukiman (perkotaan dan perdesaan)	• 25.443	• 7,99
	• Kawasan perindustrian	• 700	• 0,91
	• Kawasan khusus militer	• tak tersedia data	• tak tersedia data
	• Kawasan pesisir dan kelautan	• tak tersedia data	• tak tersedia data

Sumber: Peninjauan Kembali RTRW DIY 2002

Masalah alih fungsi lahan pertanian subur terus terjadi untuk kepentingan budidaya kegiatan non pertanian seperti perdagangan, perumahan, dan industri. Bahkan terjadi masalah pemanfaatan kegiatan permukiman di kawasan lindung. Pembangunan permukiman di kawasan resapan air kurang dibarengi dengan pengendalian yang memadai. Masalah lain adalah munculnya kawasan industri baru yang berlokasi diluar kawasan industri yang telah diperuntukkan.

C. Kawasan Prioritas Internal DIY

- 1) Kawasan prioritas tumbuh cepat yang mencakup kawasan kaki Merapi dan dataran Yogyakarta-Bantul dengan potensi pertanian lahan basah, pariwisata dan permukiman.
- 2) Kawasan prioritas penunjang sektor strategis yang mencakup kawasan perkotaan Yogyakarta (di wilayah ring-road) dan pusat-pusat pertumbuhan seperti Wates, Nanggulan, Srandakan, Piyungan, Prambanan, Bantul, Godean, Imogiri, dan Wonosari.
- 3) Kawasan pantai potensial untuk kegiatan ekonomi pariwisata adalah pantai-pantai yang telah berkebang seperti Glagah, Samas, Parangtritis, Baron, Kukup, Krakal, dan Sadeng. Adapun pantai lain yang sedang berkembang adalah pantai Congot, Trisik, Pandansimo, Sundak, Wediombo, Ngrenean, Drini, dan Ngungap.

D. Perkembangan Internal Kabupaten-Kota di DIY

- 1) Kota Yogyakarta
 - Keberadaan KARTOMANTUL perlu adanya kerjasama tata ruang dalam menentukan Yogyakarta sebagai sistem kota satelit atau metropoli. Dalam RTRW DIY, perkotaan inti Yogyakarta berada dalam ring-road dengan dukungan Godean, Pakem-Ngaglik, Sleman-Tempel sebagai pusat pertumbuhan.

- Dari aspek pariwisata, keterkaitan obyek wisata Prambanan-Boko-Tamansari merupakan wisata budaya dan sejarah yang bisa menjadi satu paket wisata.
- Dalam konsep “*Yogyakarta Incorporate*,” kejelasan Yogyakarta sebagai kawasan pusat perkotaan DIY terletak dalam kawasan ring-road.

2) Kabupaten Sleman

- Keberadaan stadion, kawasan perumahan, dan pusat bangkitan di wilayah Depok dan sekitarnya mendukung fungsi Sleman sebagai PKW Wilayah GELANGMANTEN.
- Keberadaan delapan mall baru di kawasan inti perkotaan Yogyakarta perlu dibarengi dengan pengembangan pusat inti kota (dalam ring road) dengan pengembangan vertikal.¹
- Sleman memiliki 28 desa wisata sehingga aset ini mendukung Sleman sebagai kawasan wisata pertanian dan budaya.
- Wilayah utara Kalasan dan Prambanan potensial sebagai daerah pengembangan industri.
- Pusat-pusat pertumbuhan Sleman berada di wilayah Prambanan, Depok-Mlati, Ngaglik-Pakem, Gamping, Godean, dan Sleman Tempel.

3) Kabupaten Bantul

- Keberadaan pasar seni di Parangtritis mampu mendukung Parangtritis sebagai obyek wisata wisataa pantai, sejarah, dan sejarah
- Bantul memiliki 52 sentra industri kerajinan, sehingga pengembangan outer ringroad di wilayah ini akan memperkuat pengembangan wilayah selatan-selatan.
- Pengembangan resor potensial untuk kawasan pantai Panadansimo dn Samas akan mendukung jalur wisata selatan-selatan.
- Pengembangan Piyungan didorong ke arah selatan untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi Gunungkidul, termasuk kegiatan industri kerajinan dan pariwisata.
- Pengendalian pemanfaatan lahan antara perkotaan Yogyakarta dan Bantul Kota Mandiri (BKM) akan mendukung kejelasan inti perkotaan Yogyakarta didalam kawasan ring-road.

4) Kabupaten Kulonprogo

- Potensi jalur aset wisata Borobudur-Suroloyo-Guakiskendo-Wates-Sermo-Glagah akan memperkuat paket wisata alam Kulonprogo.
- Keberadaan DAS menjadi satu kesatuan, sehingga pengelolaan sungai Progo lepas dari wilayah administrasi atau “one river one managemen.”

¹ Kebijakan RTRW DIY 2004-2014

- Daerah potensi wisata pegunungan Suroloyo-Guakiskendo-Semo perlu ditunjang dengan kegiatan desa wisata dengan dilengkapi fasilitas home-stay.
- Pengembangan Kampus 3 UNY akan meningkatkan pertumbuhan kota Wates.
- Perlunya dilakukan pembukaan dan perkuatan akses untuk lebih meningkatkan kesejahteraan, membuka keterisolasian, mengurangi tingkat kemiskinan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kulonprogo.

5) Kabupaten Gunungkidul

- Pengembangan sentra-sentra industri kerajinan di Gunungkidul sebagai upaya peningkatan kemandirian sentra untuk dapat mengolah bahan baku yang banyak tersedia di wilayah ini.
- Di wilayah Ponjong, Semanu dan Semin memiliki potensi batu kalsit namun pengolahan dilakukan di Bali.
- Pengembangan home-stay dikawasan obyek wisata pantai Krakal, Baron dan Kukup akan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat lokal.
- Pengembangan desa wisata Semin, Putal, dan Mulo untuk peningkatan ekonomi lokal.
- Pantai Sadeng sebagai tempat pendaratan ikan potensial bagi pengembangan wilayah selatan-selatan dari sektor ekonomi perikanan dan pariwisata.
- Untuk membuka keterisolasian wilayah Gunungkidul ke utara yang selama ini masih sulit dijangkau karena kendala kondisi fisik-geografi pegunungan, perlu dilakukan pembukaan akses.
- Pengembangan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan perlu didorong dengan potensi pariwisata dan industri kecil sebagai daya tarik.

2.2.3. Perkembangan Eksternal DIY

Dalam konteks yang lebih luas mengenai Tatrawil Propinsi DI Yogyakarta, diperlukan analisis yang lebih tajam didalam melihat hubungan antara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah-wilayah yang ada disekitarnya. Wilayah tersebut adalah: Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sukoharjo.

Dengan memperhatikan dan mendudukkan Propinsi DIY sebagai titik tumbuh dan generator aktivitas, dan wilayah-wilayah yang berbatasan dengannya, serta wilayah yang mendapatkan pengaruh sebagai wilayah hinterland (daerah belakang), maka dapat ditentukan pola dan hubungan keruangan yang terjadi. Pola dan hubungan keruangan yang terjadi ini akan didasarkan pada tiga variabel utama: fisik dasar (dalam skala makro), aspek demografi dan aspek perekonomian.

Analisis lanjutan akan mempertimbangkan hubungan antara indikator jumlah penduduk, PDRB dan pendapatan perkapita dalam melihat disparitas (kesenjangan wilayah). Indeks Williamson dan Tipologi Klaasen akan dipergunakan sebagai pendukung

analisis keterkaitan antar variabel ini. Tentu saja, angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan Indeks Williamson dan tipologi Klaasen harus dicocokkan lagi dengan issue mengenai tenaga kerja pada masing-masing wilayah untuk mengetahui sejauh mana dinamika kewilayahan terpengaruh oleh komponen perekonomian.

Tabel 2. 11. Gabungan Komponen Kependudukan dan Perekonomian Propinsi Jawa Tengah

Wilayah	Jumlah penduduk 1998 (jiwa)	Jumlah penduduk 2002 (jiwa)	PDRB 1998 (juta rupiah)	PDRB 2002 (juta rupiah)	PDRB/kapita 1998 (rupiah)	PDRB/kapita 2002 (rupiah)
Kab. Magelang		1.127.714	1.916.543,16	3.384.521,02	1.699.493,99	3.001.222,85
Kota Magelang		116.498	551.158,62	968.104,21	4.731.056,50	8.310.050,04
Kab. Klaten		1.167.613	2.401.925,31	3.891.798,65	2.057.124,50	3.333.123,77
Kab. Purworejo		705.272	1.496.625,09	2.415.435,73	2.122.053,75	3.424.828,62
Kab. Wonogiri		974.353	1.603.375,43	2.500.706,30	1.645.579,61	2.566.530,10
Kab. Sukoharjo		799.493	2.064.458,51	3.253.835,20	2.582.209,61	4.069.873,28
Prop Jateng (total)	30.385.445	31.691.866	84.610.222,51	156.418.300,46	2.784.564,21	4.935.597,68

Sumber: analisis, 2004

Tabel 2.11 diatas memperlihatkan gambaran komponen demografi dan perekonomian dari wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY. Dengan mencermati bahwa selama 5 tahun (dari 1998 hingga 2002), laju pertumbuhan rata-rata penduduk pada tingkat Propinsi di Jawa Tengah adalah sebesar 0,46% per tahun, dan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu yang sama tumbuh rata-rata sebesar 0,96% per tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kecenderungan tumbuh lambat (lihat Tabel 2.12).

Tabel 2. 12. Gabungan Komponen Kependudukan dan Perekonomian Propinsi DI Yogyakarta

Wilayah	Jumlah penduduk 1995 (jiwa)	Jumlah penduduk 2000 (jiwa)	PDRB 1995 (juta rph)	PDRB 2000 (juta rupiah)	PDRB/kapita 1995 (rupiah)	PDRB/kapita 2000 (rupiah)
Kota Yogyakarta	466.313	397.395	142.020	1.358.784,11	3.045.587,00	3.419.228,00
Kab. Bantul	744.754	781.059	85.626	847.322,48	1.149.725,00	1.084.838,00
Kab. Kulon Progo	428.625	370.965	56.463	335.058,93	1.317.310,00	903.209,00
Kab. Gunungkidul	724.685	670.544	90.398	930.703,67	1.247.415,00	1.387.983,00
Kab. Sleman	794.101	901.735	131.216	1.453.614,85	1.652.389,00	1.612.020,00
Prop. DIY (total)	3.158.478	3.121.701	512.856	4.925.484,05	1.623.744,00	1.609.143,00

Sumber: analisis, 2004

Tabel 2.12 diatas memperlihatkan gambaran komponen demografi dan perekonomian Propinsi DI Yogyakarta. Dengan mencermati bahwa selama 5 tahun (dari

1995 hingga 2000), laju pertumbuhan rata-rata penduduk pada tingkat Propinsi di Propinsi DI Yogyakarta adalah sebesar -0,41% per tahun, dan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu yang sama tumbuh rata-rata sebesar 3,62% per tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Propinsi DI Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki kecenderungan untuk tumbuh lambat (lihat Tabel 2.13).

Tabel 2. 13. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Propinsi Jawa Tengah

Wilayah	kelompok usia (data 2002)			Persentase Penduduk produktif	Prosentase penduduk relatif terhadap propinsi	<i>dependency ratio</i>
	belum produktif (0 – 14)	produktif (15-64)	tidak produktif (64 ke atas)			
Kab. Magelang	310.245	748.727	68.742	66,39	<i>lebih besar</i>	51
Kota Magelang	28.148	80.168	8.182	68,81	<i>lebih besar</i>	45
Kab. Klaten	292.129	745.437	130.047	63,84	lebih kecil	57
Kab. Purworejo	192.673	440.447	72.252	62,45	lebih kecil	60
Kab. Wonogiri	235.815	623.287	115.251	63,97	lebih kecil	56
Kab. Sukoharjo	216.460	520.440	62.593	65,10	lebih kecil	54
Prop Jateng (total)	9.019.288	20.656.575	2.016.003	65,18		53

Sumber: analisis, 2004

Bila dicermati pada masing-masing wilayah berdasarkan atas struktur penduduk menurut kelompok umur (belum produktif, produktif dan tidak produktif), terlihat bahwa Kab. Magelang dan Kota Magelang memiliki persentase penduduk produktif lebih besar relatif dibandingkan dengan persentase penduduk usia produktif dalam wilayah yang lebih luas (Propinsi Jawa Tengah). Hal ini memperlihatkan beberapa kemungkinan, antara lain bahwa Kab. Magelang dan Kota Magelang digabungkan memiliki penduduk usia subur relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya dan tingkat harapan hidup lebih tinggi. Kemungkinan yang lain adalah di Kab. Magelang dan kota Magelang memiliki generator-generator aktivitas yang unik/spesifik yang tidak ditemui di wilayah-wilayah lainnya (seperti AKMIL dan Universitas Muhammadiyah Magelang yang memiliki *enrollment rate* (usia sekolah) cukup tinggi untuk wilayah dengan ukuran seperti Magelang). Selain itu, dari hasil perhitungan, *dependency ratio* (angka ketergantungan usia non produktif kepada usia produktif) Kab. Magelang dan Kota Magelang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *dependency ratio* untuk Propinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas penduduk di Kab. dan Kota Magelang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produktivitas penduduk untuk wilayah-wilayah lain yang berdekatan dan Propinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Sementara itu Kab. Purworejo juga memiliki *dependency ratio* yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain disekitarnya. Bila dibandingkan dengan besaran PDRB dan PDRB per kapita, ternyata terlihat bahwa Kab. Purworejo memiliki nilai yang juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Dengan memetakan besaran-

besaran ini dalam konteks keruangan makro (keruangan wilayah Propinsi Jawa Tengah dan hubungannya dengan Propinsi DIY) terlihat bahwa selain Kab. Magelang dan kota Magelang, maka wilayah-wilayah yang lain justru memiliki daya dorong bagi penduduk yang berdiam pada masing-masing wilayah untuk pergi meninggalkan wilayahnya. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor antara lain:

1. Tingginya *dependency ratio* dan rendahnya produktivitas penduduk pada wilayah-wilayah bersangkutan;
2. Rendahnya daya tarik pada masing-masing wilayah (antara lain dicerminkan melalui rendahnya kontribusi PDRB masing-masing wilayah terhadap PDRB Propinsi secara keseluruhan) – yang terkait erat dengan kemampuan penyediaan anggaran pembangunan untuk pengadaan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan sehari-hari pada masing-masing wilayah;
3. Rendahnya laju pertumbuhan perekonomian pada masing-masing wilayah yang berbatasan dengan Propinsi DIY (yang secara tidak langsung menggantungkan harapan adanya *spillover effect* (daerah sekitarnya turut menikmati hasil pembangunan di pusat pertumbuhan) dari tingginya kegiatan perekonomian di wilayah Propinsi DIY) yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penduduk untuk bekerja di wilayah Propinsi DIY, baik sebagai tenaga kerja tetap ataupun sebagai tenaga kerja musiman (commuter). Catatan khusus diberikan kepada semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja musiman (commuter) ini, karena berpotensi meningkatkan beban guna pada ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan antara Propinsi DIY dengan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah;
4. Distribusi penduduk yang relatif masih belum merata pada masing-masing wilayah (sebagian besar masih terkonsentrasi pada wilayah rural yang cenderung tidak banyak kesempatan kerjanya).

Tabel 2. 14. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Propinsi Di Yogyakarta

Wilayah	kelompok usia (data 2000)			Persentase Penduduk produktif	% pddk. produktif relatif terhadap prov.	Dependency ratio
	Belum produktif (0-14th)	Produktif (15-64)	Tidak produktif (64+)			
Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
Kab. Bantul*)	207.797	581.025	-	74,39	lebih besar	35,76
Kab. Kulon Progo	-	-	-	-	-	-
Kab. Gunungkidul	112.064	325.296	-	48,51	lebih kecil	34,45
Kab. Sleman	189.266	646.543	65.614	71,70	lebih besar	39,42
Prop. DIY (total)	651.499	2.137.429	332.773	68,47		46,05

Ket. *) : data tahun 2002

Bila dicermati pada masing-masing wilayah berdasarkan atas struktur penduduk menurut kelompok umur (belum produktif, produktif dan tidak produktif), terlihat bahwa Kab. Bantul dan Sleman memiliki prosentase penduduk produktif lebih besar dibandingkan dengan Propinsi DI Yogyakarta. Seharusnya Kab. Bantul dan Sleman termasuk ke dalam kategori wilayah tumbuh cepat. Tetapi karena faktor geografis (didominasi oleh pertanian yang sangat dipengaruhi oleh iklim) maka terjadi perlambatan pertumbuhan yang menyebabkan wilayah-wilayah tersebut masuk ke dalam kategori tumbuh lambat.

Hasil perhitungan dependency ratio menunjukkan bahwa Kab. Bantul, Sleman, dan Gunungkidul memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai dependency ratio Propinsi DI Yogyakarta. Nilai dependency ratio yang lebih rendah, menunjukkan suatu wilayah tumbuh cepat. Kedua hal yang bertolak belakang ini akan diverifikasi dengan analisis Tipologi Klaasen dan Index Williamson.

Tipologi Klaasen merupakan alat bantu untuk mengukur disparitas (kesenjangan antar wilayah) dengan menggunakan variabel wilayah dan jumlah penduduk. Tipologi Klaasen membagi pengelompokan berdasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga terbentuk kelompok wilayah dengan karakteristik:

- 1) Maju (*developed areas*)
- 2) Berkembang (*developing areas*)
- 3) Lamban (*potentially less developed*)
- 4) Kurang berkembang (*less developed areas*)

Dasar-dasar perhitungan yang dilakukan antara lain bersandarkan pada:

- 1) PDRB per kapita baik tiap sub region maupun seluruh region (PDRB/kapita);
- 2) Rasio Pertumbuhan PDRB baik secara sub region maupun seluruh region (R PDRB);
- 3) Rasio besar PDRB per kapita sub region terhadap PDRB per kapita rata-rata reion (R PDRB/kapita), dan
- 4) Rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB regional (R PDRB I)

Kriteria penentuan karakteristik wilayah yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Propinsi Di Yogyakarta

	Rasio Besar PDRB/kapita sub region terhadap PDRB/kapita		
		≥ 1	≤ 1
Rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB region (R PDRB I)	≥ 1	Maju (<i>developed area</i>)	Berkembang (<i>developing area</i>)
	≤ 1	Lamban (<i>potentially less developed area</i>)	kurang berkembang (<i>less developed area</i>)

Dengan bersandarkan pada kriteria-kriteria diatas, kemudian dikembangkan tabel indikasi awal untuk menghitung klasifikasi wilayah atas dasar tipologi Klaasen sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini. Adapun data-data yang dipakai adalah data-data mengenai:

- 1) Jumlah penduduk (tidak perlu time-series, tapi akan lebih baik apabila ada);
- 2) Data mengenai PDRB dalam dua tahun yang berbeda (ada durasi waktunya), dan
- 3) Data PDRB per kapita (tidak perlu time-series, tapi akan lebih baik apabila ada).

Tabel 2. 16. Analisis Tipologi Klaasen untuk wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta

	<i>Tipologi Klaasen</i>		
	<i>Rasio PDRB / kapita</i>	Rasio PDRB	<i>Rasio PDRB Index</i>
Kab. Magelang	0,61	76,60	0,99
Kota Magelang	1,70	75,65	0,98
Kab. Klaten	0,74	62,03	0,80
Kab. Purworejo	0,76	61,39	0,79
Kab. Wonogiri	0,59	55,97	0,72
Kab. Sukoharjo	0,93	57,61	0,75
Prop Jateng (total)		77,25	

Sumber: analisis, 2004

Dari Tabel 2.16 diatas, terlihat bahwa untuk pasangan R PDRB/kapita dan R PDRB I ≥ 1 (keduanya sama-sama bernilai ≥ 1) tidak ada, yang berarti dari keenam wilayah tersebut, semuanya tidak ada yang masuk dalam kategori wilayah tumbuh cepat, bahkan untuk pasangan R PDRB/kapita dan R PDRB I ≥ 1 , juga tidak ada. Sehingga dari hasil temuan berdasarkan analisis tipologi Klaasen, apabila dibandingkan dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, memperlihatkan kesamaan pola dan keserupaan struktur disparitas wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai pengelompokan wilayah-wilayah amatan berdasarkan tipologi Klaasen.

Tabel 2. 17. Pengelompokan Wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta

	Rasio Besar PDRB/kapita sub region terhadap PDRB/kapita		
		≥ 1	≤ 1
rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB region (R PDRB I)	≥ 1	wilayah tumbuh cepat – tidak ada	wilayah berkembang – tidak ada
	≤ 1	wilayah lamban - Kota Magelang	wilayah relatif lambat pertumbuhannya - Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Purworejo, kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo

Sumber: analisis, 2004

Melihat hasil analisis di atas, maka bila dikaitkan dengan Propinsi DIY, maka disparitas wilayah yang terjadi, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan diatas (enam kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah), sangat tinggi terutama bila melihat bahwa Propinsi DIY dewasa ini dikategorikan sebagai metropolitan sangat tinggi besaran purchasing power parity-nya, ranking no. 2 dibawa metropolitan (cenderung megalopolis) Jakarta. Tentu saja hal ini masih harus di cross-check dengan analisis tipologi Klaasen untuk wilayah Propinsi DIY, yang akan dianalisis pada bagian selanjutnya.

Tabel 2. 18. Analisis Tipologi Klaasen untuk wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta

	<i>tipologi Klaasen</i>		
	<i>Rasio PDRB per kapita</i>	Rasio PDRB	<i>Rasio PDRB Index</i>
Kota Yogyakarta	1,09	12,27	0,16
Kab. Bantul*)	0,41	-5,64	-0,07
Kab. Kulon Progo	0,47	-31,44	-0,41
Kab. Gunungkidul	0,45	11,27	0,15
Kab. Sleman	0,59	-2,44	-0,03
Prop. DIY (total)		-0,90	

Sumber: analisis, 2004

Dari Tabel 2.18 diatas, terlihat bahwa untuk pasangan R PDRB/kapita dan R PDRB I ≥ 1 (keduanya sama-sama bernilai ≥ 1) tidak ada, yang berarti dari kelima wilayah tersebut, semuanya tidak ada yang masuk dalam kategori wilayah tumbuh cepat, bahkan untuk pasangan R PDRB/kapita dan R PDRB I ≥ 1 , juga tidak ada. Sehingga dari hasil temuan berdasarkan analisis tipologi Klaasen, apabila dibandingkan dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, memperlihatkan kesamaan pola dan keserupaan struktur disparitas wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai pengelompokan wilayah-wilayah amatan berdasarkan tipologi Klaasen.

Tabel 2. 19. Pengelompokan Wilayah dalam Prop. DI Yogyakarta

	Rasio Besar PDRB/kapita sub region terhadap PDRB/kapita		
		≥ 1	≤ 1
rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB region (R PDRB I)	≥ 1	wilayah tumbuh cepat -tidak ada	wilayah berkembang – <i>tidak ada</i>
	≤ 1	wilayah lamban – Kota Yogyakarta	wilayah relatif lambat pertumbuhannya – Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul

Selain tipologi Klaasen, perhitungan indeks Williamson merupakan salah satu analisis untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan per kapita antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Dalam analisis ini, akan dihitung indeks Williamson untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan per kapita antara wilayah-wilayah yang

berbatasan langsung dengan Propinsi DIY. Tujuan akhir dari analisis dengan Indeks Williamson adalah untuk mengukur homogenitas dari keenam wilayah kabupaten/kota tersebut. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah besaran PDRB dari dua tahun yang berbeda (semakin jauh rentang waktunya semakin baik, asalkan keduanya telah diekstrapolasi untuk menguji seberapa besar deviasi antara dua titik dengan data-data faktual).

Dasar dari Indeks Williamson berupa persamaan probabilitas: $0 < IW < 1$, yang berarti apabila nilai IW mendekati 0, maka tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah juga semakin kecil (tingkat pemerataan semakin baik), sedangkan apabila nilai IW mendekati 1 maka tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah juga semakin besar (tingkat pemerataan semakin buruk, disparitas tinggi). Dalam beberapa kasus, dapat juga disimpulkan sebagai berikut: semakin kecil nilai IW-nya (mendekati 0) berarti semakin homogen wilayah-wilayah yang dianalisis, sedangkan semakin besar nilai IW-nya (mendekati 1) berarti semakin beragam keunggulan komparatif dan daya saing dari masing-masing wilayah relatif terhadap wilayah yang jauh lebih besar tersebut sebagai batasan analisis.

Tabel 2. 20. Index Williamson untuk wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta

	<i>indeks Williamson</i>	<i>produktivitas tenaga kerja (juta rupiah/jiwa)</i>	R prod.
	2002	2002	
Kab. Magelang	133.147.320.301,31	4,52	<i>kecil</i>
Kota Magelang	41.857.883.101,25	12,08	<i>besar</i>
Kab. Klaten	94.609.129.326,73	5,22	<i>kecil</i>
Kab. Purworejo	50.793.132.649,26	5,48	<i>kecil</i>
Kab. Wonogiri	172.553.358.894,29	4,01	<i>kecil</i>
Kab. Sukoharjo	18.907.154.518,54	6,25	<i>kecil</i>
Prop Jateng (total)	IW = 0,145		

Sumber: analisis, 2004

Dari hasil analisis, ternyata dari keenam wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY, memiliki nilai indeks mendekati 0 (sangat kecil, 0,145). Hal ini memperlihatkan, terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah dalam aspek kependudukannya, disparitas wilayah yang terjadi relatif kecil. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki keunggulan komparatif yang relatif sama satu dengan lainnya.

Tabel 2. 21. Index Williamson untuk wilayah di Prop. DI Yogyakarta

	<i>indeks Williamson</i>		<i>produktivitas tenaga kerja (juta rupiah/jiwa)</i>	
	1995	2000	2000	R prod.
Kota Yogyakarta	52.560.347.858,53	28.832.664.235,74	-	-
Kab. Bantul	336.819.357.785,58	365.450.754.478,11	1,46	kecil
Kab. Kulon Progo	177.066.284.878,56	190.331.162.584,16	-	-
Kab. Gunungkidul	311.047.210.100,52	266.288.467.150,44	2,86	Besar
Kab. Sleman	270.100.201.253,41	314.298.844.612,77	2,25	Kecil
Prop. DIY (total)	0,34	0,35	2,30	

Sumber: analisis, 2004

Dari hasil analisis, ternyata Propinsi DI Yogyakarta disparitas wilayahnya cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya penumpukan fasilitas dan infrastruktur di wilayah-wilayah tertentu. Dengan hanya bersandarkan pada data di atas, terlihat seolah-olah Kab. Gunungkidul memiliki produktifitas tinggi. Namun hasil analisis ini tidak berkorelasi dengan kondisi di lapangan karena faktor geografis yang didominasi oleh pegunungan karst dan tingginya tingkat migrasi keluar.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Selain menggunakan indikator-indikator ekonomi, seperti PDRB ataupun pendapatan perkapita, perkembangan wilayah serta kemungkinan pergerakan barang, jasa dan manusia dapat dilihat melalui karakteristik manusia yang menghuni ruang wilayah amatan, dalam hal ini adalah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa indikator yang terkait dengan hal ini adalah indikator IPM, IKM serta elastisitas tenaga kerja.

Angka IPM berkisar antara 0 – 100. Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh – shortfall - untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100. Angka ini diperbandingkan antar daerah. Dengan demikian, tantangan bagi semua daerah adalah untuk menemukan cara mengurangi nilai shortfall mereka. IPM mengungkapkan status pembangunan manusia sebagai berikut:

Kategori tinggi : IPM lebih dari 80
 IMP menengah atas : IPM antara 66.00 – 79.99
 IPM menengah bawah : IPM antara 50.00 – 65.99
 IPM bawah : IPM kurang dari 50.00

IPM disusun berdasarkan beberapa faktor lokal, yaitu usia harapan hidup, prosentase penduduk yang melek huruf, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Atas dasar faktor-faktor ini, dapat disusun IPM untuk masing-masing kabupaten/kota hingga pada tingkat Propinsi. Kemudian nilai IPM untuk masing-masing wilayah ini diperbandingkan dalam bentuk klasifikasi dan rangking. Adanya peningkatan rangking dapat dimaknai bahwa kegiatan pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan cukup baik, yang pada gilirannya diharapkan dapat menekan angka urbanisasi dan pengangguran (bila dikaitkan dengan employment elasticity).

Tabel 2.22 dibawah memperlihatkan gambaran kabupaten dan kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IPM. Dari empat faktor penyusun IPM dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pada seluruh wilayah tersebut, dengan peningkatan tertinggi disumbangkan oleh kota Magelang. Hal ini ternyata sesuai dengan analisis kesenjangan pendapatan melalui Indeks Williamson dan Klaasen typology yang telah dikembangkan sebelumnya. Bahkan dengan mencermati angka-angka pada bagian pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan terlihat bahwa selain Kabupaten dan Kota Magelang, wilayah-wilayah lain di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan secara langsung dengan DIY juga mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar dialami oleh Kabupaten Klaten dan Sukoharjo.

Tabel 2. 22. Gambaran kabupaten/kota Jateng disekitar Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IPM

Kab/Kota	Harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (%)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah)		IPM		Rangking IPM		Reduksi shortfall IPM
	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	
Kab. Magelang	64,5	68	81,6	86,2	5,9	6,3	584,4	585,9	66,4	65,1	163	118	-1,5
Kota Magelang	66,8	69,1	92,5	93,4	8,3	9	589,9	597,5	72,3	70,2	42	25	-1,9
Kab. Klaten	65,6	69,1	79,1	81,1	6,2	6,7	595	589	67,5	65,1	135	121	-1,9
Kab. Purworejo	64,1	67,7	86,2	86,3	6,1	6,3	590,9	590,5	67,8	65,3	124	112	-2
Kab. Wonogiri	70,6	71,1	71,6	76,4	4,8	5,6	588,2	584,2	67	64	146	152	-2,1
Kab. Sukoharjo	68,8	69,1	79,1	81,1	6,2	6,7	595	589	67,5	65,1	135	121	-1,9
PropJateng (total)	64,8	68,3	81,3	84,8	5,5	6	594,5	583,8	67	64,6	17	14	-1,9

Sumber: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi & pembangunan manusia di Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia 2001

Walaupun indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya trend yang fluktuatif sifatnya, namun secara keseluruhan, apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, maka kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan DIY menunjukkan peningkatan dalam proses pembangunan kualitas SDM yang dimilikinya. Perkecualian terlihat pada Kabupaten Wonogiri, yang dalam periode 1996 hingga 1999 justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka migrasi (dalam bentuk boro) ke wilayah-wilayah disekitarnya yang lebih menjanjikan (terutama ke Kabupaten Karanganyar dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki kegiatan-kegiatan basis dalam bentuk perindustrian, perdagangan dan jasa). Korelasi antara IPM dengan kesenjangan antar wilayah juga diperlihatkan dengan tingginya kecepatan Kabupaten dan Kota Magelang didalam kegiatan pembangunan kualitas SDM yang dimilikinya (lihat pada tabel diatas). Sehingga dengan mencermati faktor-faktor penyusun IPM dengan IPM dan ranking IPM se-Indonesia untuk wilayah-wilayah ini, secara umum dapat dikatakan bahwa reduksi shortfall IPM secara keseluruhan adalah rendah.

Tabel 2. 23. Gambaran kabupaten/kota Jateng di Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IPM

Kab/Kota	Harapan hidup (tahun)		Angka melek huruf (%)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah)		IPM		Rangking IPM		Reduksi shortfall IPM
	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	
Kota Yogyakarta	71,2	72,1	93,6	95,1	9,7	10,3	591,3	598,9	76,1	73,4	5	2	-2,3
Kab. Bantul	68,5	69,5	79,2	82,6	6,4	6,8	598,2	590,2	69,5	65,8	79	102	-2,3
Kab. Kulon Progo	70,4	71,3	79,2	82,8	6,2	6,8	593,5	583,7	70	66,4	68	85	-2,3
Kab. Gunungkidul	69,9	70,1	66,7	83	4,5	7,1	588,3	552,4	65,3	63,6	187	165	-1,7
Kab. Sleman	70,7	71,6	82,6	85,7	7,8	8,5	602,9	601,5	72,9	69,8	33	27	-2,2
Prop. DIY (total)	69,9	70,9	79,8	85,5	6,9	7,9	612,3	597,8	71,8	68,7	2	2	-2,2

Sumber: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi & pembangunan manusia di Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia 2001

Secara umum, gambaran kabupaten dan kota di Propinsi DIY berdasarkan faktor-faktor penyusun IPM memperlihatkan hal-hal yang cukup menarik. Untuk faktor-faktor seperti usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, seluruh kabupaten dan kota di Propinsi DIY memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti, bahkan untuk Kab. Gunungkidul memperlihatkan besaran yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi DIY telah berupaya keras meningkatkan kualitas SDM yang ada di wilayahnya masing-masing, dan tidak hanya terpaku pada pengembangan kegiatan perekonomian yang ada di wilayahnya (yang tercermin dari besaran PDRB, PDRB perkapita, serta tingginya daya serap tenaga kerja melalui employment elasticity). Namun bila dikaitkan dengan besarnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Secara rata-rata di Propinsi DIY untuk komponen pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan mengalami penurunan, terutama karena pada periode ini pada skala makro terjadi krisis ekonomi yang diawali oleh krisis fiskal dan dilanjutkan oleh krisis moneter. Namun, Kota Yogyakarta pada periode yang sama justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan pada periode yang sama. Apabila ini dikaitkan dengan banyaknya tenaga kerja yang di sektor informal serta mereka yang datang dan berbelanja pada sektor perdagangan dan jasa, terlihat adanya korelasi yang cukup signifikan. Pada saat indikator-indikator ekonomi makro mengalami pengerutan (kontraksi), maka akan terjadi penggelembungan pada indikator-indikator ekonomi mikro. Bahkan, bila dikaitkan dengan beberapa bentuk analisis dalam konteks development studies, anomali ini dapat dijelaskan melalui Teori Penciptaan Tenaga Kerja yang merupakan kritik terhadap Teori Redireksi Investasi-nya Cheney yang menyatakan bahwa di negara-negara berkembang, pertumbuhan indikator-indikator ekonomi (seperti PDRB dan PDRB perkapita) tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan makro. Bahkan munculnya lapangan-lapangan kerja, utamanya pada sektor informal memperlihatkan bahwa sebuah wilayah akan cepat pulih

dari krisis ekonomi bila ditopang oleh keberadaan sektor informal. Dan ini ternyata juga terbukti di Thailand dan Korea Selatan, yang telah pulih dari terpaan krisis ekonomi pada tahun '97 – '98 yang lalu.

Korelasi antara IPM dengan Indeks Williamson dan Klaasen tipology yang mencoba mengukur kesenjangan antar wilayah juga memperlihatkan hasil yang sama, walaupun menggunakan indikator-indikator yang berbeda². Secara rata-rata Propinsi DIY tetap berada pada tiga besar wilayah yang memiliki kualitas SDM yang baik (ranking 2 untuk seluruh wilayah Indonesia pada periode 1996 – 1999). Namun hal ini tidak serta-merta berkorelasi dengan wilayah-wilayah yang ada didalamnya. Kabupaten Bantul dan Kulonprogo justru mengalami penurunan ranking IPM, sedangkan Kota Yogyakarta, Kab. Gunungkidul dan Kab. Sleman mengalami peningkatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan banyaknya konsentrasi institusi-institusi pendidikan berskala regional yang terpusat di perbatasan Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman yang turut mempengaruhi tingginya kualitas SDM yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut. Sementara untuk kasus Gunungkidul hal ini tercermin dari tingginya tingkat migrasi penduduk ke luar wilayah yang berakibat pada besarnya pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan (karena adanya uang masuk dalam bentuk devisa) – dengan kata lain, sektor basis Kab. Gunungkidul adalah ketenagakerjaan.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

IKM (di dalam global HRD disebut HPI-1) mengukur kemiskinan di negara berkembang. Variabel-variabel yang digunakan adalah persentase penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, persentase penduduk dewasa buta huruf, dan deprivasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara keseluruhan, baik yang bersifat publik atau bukan, yang diwakili oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih, dan persentase anak berumur lima tahun ke bawah dengan berat badan rendah (kurang gizi).

Tabel 2. 24. Gambaran Kabupaten/kota Jateng disekitar Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IKM

Kab/Kota	Penduduk yg. diperkirakan tidak mencapai usia 40 thn (%)	Angka buta huruf usia dewasa (%)	Penduduk tanpa akses air bersih (%)	Penduduk tanpa akses terhadap sarana kesehatan (%)	Balita kurang gizi (%)	IKM	Ranking IKM
Kab. Magelang	12.1	13.8	28.9	27.3	28.0	20.7	228
Kota Magelang	10.6	6.6	18.1	0.0	19.2	10.4	289
Kab. Klaten	10.5	18.9	54.7	17.1	25.3	24.1	182
Kab. Purworejo	12.6	13.7	57.8	12.3	24.1	22.8	197
Kab. Wonogiri	7.9	23.6	41.3	25.9	17.7	23.0	193
Kab. Sukoharjo	10.5	16.0	64.8	17.1	18.6	24.3	181
Prop Jateng (total)	11.7	15.2	47.8	17.1	30.5	23.2	7

Sumber: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi & pembangunan manusia di Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia 2001

² IPM menggunakan indikator-indikator atas dasar komponen demografi, sementara indeks Williamson dan Klaasen tipology menggunakan indikator-indikator ekonomi makro.

Tabel 2.24 memperlihatkan gambaran faktor-faktor penyusun IKM pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY beserta ranking IKM secara keseluruhan untuk Indonesia. Ada satu hal yang menarik untuk disimak, walaupun secara rata-rata Propinsi Jawa Tengah termasuk Propinsi dalam kategori yang perlu mendapatkan perhatian karena kemiskinan penduduk yang ada didalamnya, namun untuk wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY justru berkebalikan. Tingginya ranking IKM yang dimiliki oleh wilayah-wilayah ini membuktikan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidaklah masuk kedalam kategori wilayah miskin (atau dengan kata lain bahwa kemiskinan bukanlah masalah utama bagi wilayah-wilayah tersebut). Permasalahan-permasalahan krusial yang dihadapi oleh wilayah-wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan DIY adalah akses terhadap air bersih (dalam hal ini berupa akses yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan atau dalam bentuk swadaya masyarakat setempat) dan rendahnya kualitas kesehatan (yang ditandai dengan masih tingginya persentase balita kurang gizi yang ada di wilayah ini).

Tabel 2. 25. Gambaran kabupaten/kota di Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IKM

Kab/Kota	Penduduk yg. diperkirakan tdk. mencapai usia 40 thn (%)	Angka buta huruf usia dewasa (%)	Penduduk tanpa akses air bersih (%)	Penduduk tanpa akses terhadap sarana kesehatan (%)	Balita kurang gizi (%)	IKM	Ranking IKM
Kab. Kulonprogo	7.6	17.2	39.9	23.7	21.5	21.1	221
Kab. Bantul	10.0	17.4	53.7	9.6	24.0	21.8	207
Kab. Gunungkidul	9.2	17.1	42.9	9.5	7.5	16.6	261
Kab. Sleman	7.3	14.3	46.4	8.6	18.1	18.1	249
Kota Yogyakarta	6.7	4.9	60.5	0.0	11.3	16.8	257
Prop DIY	8.2	14.5	48.9	8.6	17.3	18.5	2

Sumber: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi & pembangunan manusia di Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia 2001

Satu hal yang membedakan antara Propinsi DIY dengan Propinsi Jawa Tengah adalah walaupun secara rata-rata Propinsi DIY memiliki ranking IKM tinggi, namun tidak serta-merta diikuti oleh hal yang sama pada kabupaten dan kota yang ada dibawahnya. Permasalahan paling mendasar yang dihadapi di Propinsi DIY adalah masih tingginya penduduk tanpa akses air bersih (dalam hal ini berupa akses yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan atau dalam bentuk swadaya masyarakat setempat). Namun, bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang masuk dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah terlihat bahwa IKM di Propinsi DIY memperlihatkan angka yang relatif lebih tinggi (terutama bila perbandingan dilakukan atas dasar ranking IKM pada masing-masing wilayah).

Dari kondisi dan gambaran umum wilayah semacam ini, maka dapat ditarik kesimpulan sederhana (walaupun masih bersifat tentative) sebagai berikut:

1. Disparitas (kesenjangan) antar wilayah tidak terjadi dalam *sub region* yang berisi enam kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY (kab. dan kota Magelang, kab. Purworejo, kab. Klaten, kab. Wonogiri, kab. Sukoharjo), tapi antara

- sub region* ini dengan *sub region* lainnya dalam satu Propinsi Jawa Tengah. Hal ini berakibat kepada meningkatnya tekanan bagi region Propinsi DIY, terutama didalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan-kegiatan utama dan ikutan;
2. Keunggulan komparatif dan daya saing wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY ternyata relatif kecil. Hal ini ditunjukkan dengan:
 - a. Komposisi penduduk menurut kelompok umur ternyata didominasi oleh penduduk usia belum dan tidak produktif, yang menunjukkan bahwa *dependency ratio* cukup tinggi;
 - b. Produktivitas tenaga kerja relatif rendah (seperti terlihat pada Tabel 2.21 diatas) dengan pengecualian pada kota Magelang;
 - c. Indeks Williamson dan tipologi Klaasen memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Propinsi DIY rata-rata merupakan wilayah tumbuh lambat (*less developed regions*), dan
 - d. Laju pertumbuhan PDRB wilayah-wilayah tersebut yang tidak secepat pada masa sebelum krisis (1980 – pra 1997).
 3. Titik-titik pertumbuhan (*growth-pole*) pada masing-masing wilayah cenderung terpusat pada ibukota kabupaten/kota (pusat kota) sehingga wilayah pinggiran cenderung hanya mendapatkan sisa-sisa dari kegiatan pembangunan yang dilakukannya – akibatnya *backwash effect*³ terjadi. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah pinggiran kehilangan SD yang penting bagi pengembangan kewilayahan (terutama SDM yang potensial, karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang dimilikinya).
 4. Daya tarik terbesar di dalam Propinsi DI Yogyakarta adalah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Perkembangan kabupaten-kabupaten yang lain tidak secepat kedua wilayah ini.

Implikasi dinamika kewilayahan ini pengembangan tata transportasi wilayah Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya moda transportasi yang melintasi jalur antara wilayah-wilayah hinterland dengan wilayah Propinsi DIY, akibat Propinsi DIY bertindak sebagai *growth pole* yang menyedot sumber daya potensial yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada jam-jam puncak di sepanjang jalur transportasi

³ Gunnar Myrdal (1957) memandang bahwa kegiatan pembangunan wilayah yang berbasiskan pada konsepsi *growth pole* cenderung bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi, apabila disparitas wilayah kecil (nilai IW cenderung mendekati 0) maka wilayah-wilayah pinggiran akan menerima manfaatnya dalam bentuk *spillover* (dalam bentuk naiknya PDRB per kapita ataupun bertambahnya jumlah lapangan kerja). Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai *spread effect*. Namun bila disparitas wilayah yang terjadi besar (semisal nilai IW cenderung mendekati 1) maka wilayah-wilayah pinggiran, alih-alih menerima manfaat, sumberdaya yang dimilikinya justru tersedot dan digunakan oleh wilayah yang berperan sebagai kutub pertumbuhan tersebut. Hal ini menurut Myrdal terlihat jelas pada wilayah-wilayah di negara berkembang dan negara dunia ketiga. Oleh Myrdal, ini disebut sebagai *backwash effect*.

yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut dengan Propinsi DIY. Moda transportasi yang beragam akan menyebabkan kesulitan didalam penanganan dan pengelolaan jaringan transportasi di Propinsi DIY;

2. Penentuan titik-titik transit dan persimpangan antar moda transportasi pada wilayah-wilayah perbatasan sebagai bagian dari penyediaan layanan transportasi yang lebih baik dalam bentuk pengadaan subterminal ataupun terminal terpadu yang dikaitkan dengan terminal cargo dalam Propinsi;
3. Sistem transportasi yang terpadu yang bersifat lintas batas administrasi dan pada gilirannya akan menuntut satu bentuk kerjasama regional antar pemerintah daerah yang berwenang (terutama dalam aspek *planning, programming, budgeting* hingga pada tahapan *operation & maintenance/O&M*)
4. Peningkatan tuntutan akan layanan transportasi yang lebih baik (terutama layanan transportasi yang dapat dinikmati oleh umum dan bersifat lintas wilayah administratif) terutama moda transportasi yang bersifat *mass rapid transportation* (MRT) – dalam bentuk bus, kereta api. Dalam kaitan ini, terlihat pentingnya pengelolaan jejalur transportasi yang melewati wilayah-wilayah ini menerus ke Propinsi DIY (seperti rel KA double-track yang telah terpasang dari Kutoarjo – Yogyakarta – Solo);
5. Jalur Magelang-Yogyakarta menjadi koridor yang cukup padat karena Magelang memiliki generator aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan Purworejo dan Klaten.
6. Ada kemungkinan perkembangan koridor Yogyakarta bagian selatan – Kab. Purworejo - Kab. Klaten tidak akan secepat perkembangan koridor Magelang-Yogyakarta, dikarenakan posisi geografis kedua Kab. tersebut (Purworejo dan Klaten) yang terhimpit oleh kutub-kutub pertumbuhan yang lebih besar, dan potensi yang dimiliki keduanya. Potensi kedua kabupaten tersebut berbasis pada pertanian, yang tidak akan tumbuh secepat daerah yang berbasis pada industri atau jasa.

2.3. PERKEMBANGAN STRATEGIS WILAYAH DIY

a. Perkotaan Yogyakarta

- Perkembangan wilayah perkotaan Yogyakarta yang kurang seimbang antara wilayah perkotaan Yogyakarta bagian utara dan bagian selatan.
- Kurangnya nyamannya kawasan perkotaan: kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima, angkutan umum, dsb.

b. Keseimbangan Wilayah

- Wilayah barat DIY yaitu Kulonprogo perlu lebih ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi untuk peningkatan aksesibilitasnya sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulonprogo.

- Wilayah timur yaitu Gunung Kidul merupakan wilayah terbelakang yang perlu dorongan pertumbuhan.
- c. Kawasan strategis dan perbatasan
- Pertumbuhan kawasan KARTOMANTUL perlu diimbangi dengan kebijakan kerjasama tata ruang dan pengembangan daerah terbelakang DIY untuk wilayah Kulonprogo dan Gunungkidul.
 - Perkembangan kawasan GELANGMANTEN sangat potensial bagi daerah Sleman yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.⁴
 - Pertumbuhan kawasan PAWONSARI sangat potensial bagi pembangunan pariwisata alam dan budaya untuk memperkuat jalur selatan-selatan
 - Pengembangan kawasan PROJOGELANG merupakan potensi bagi kegiatan agropolitan dan agrowisata kawasan Pegunungan Menoreh.

⁴ Didasarkan atas RTRW Nasional 2003

BAB 2	1
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	
INTERNAL DAN EKSTERNAL	1
2.1. GAMBARAN POKOK WILAYAH NASIONAL.....	1
2.2. GAMBARAN POKOK WILAYAH DIY	3
2.1.1. Kondisi Umum Wilayah.....	3
A. Letak Geografis dan Wilayah Administratif.....	3
B. Kependudukan	4
C. Perekonomian	8
D. Kinerja Ekspor-Import.....	9
Gambar 2. 6. Distribusi PDRB Propinsi DIY.....	11
2.2.2. Perkembangan Internal Wilayah DIY	13
A. Struktur Tata Ruang Wilayah DIY	14
B. Peruntukan Ruang/ Lahan.....	14
C. Kawasan Prioritas Internal DIY	17
D. Perkembangan Internal Kabupaten-Kota di DIY	17
2.2.3. Perkembangan Eksternal DIY	19
2.3. PERKEMBANGAN STRATEGIS WILAYAH DIY	33
Gambar 2. 1. Indonesia Diantara Asia dan Australia.....	2
Gambar 2. 2. Pembagian Wilayah Administratif DIY.....	3
Tabel 2. 1. Wilayah Administrasi Propinsi DIY	3
Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Propinsi DIY.....	4
Gambar 2. 3. Wilayah Administrasi Propinsi DIY	5
Gambar 2. 4. Populasi Penduduk Propinsi DIY.....	6
Gambar 2. 5. Kepadatan Penduduk Propinsi DIY menurut Kabupaten/Kota	7
Tabel 2. 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi DIY	8
Tabel 2. 4. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan.....	8
Tabel 2. 5. Distribusi PDRB Dilihat dari Kabupaten/Kota dan Sektor Lapangan Usaha.....	9
Tabel 2. 6. Perkembangan Ekspor DIY.....	9
Tabel 2. 7. Volume dan Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Negara Tujuan	10
Tabel 2. 8. Volume dan Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Pelabuhan Utama.....	10
Gambar 2. 7. Volume Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Negara Tujuan	12
Gambar 2. 8. Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Negara Tujuan	12
Gambar 2. 9. Nilai Ekspor di Propinsi DIY Berdasar Pelabuhan Utama	12
Tabel 2. 9. Volume dan Nilai Import di Propinsi DIY Berdasar Negara Asal	13
Tabel 2. 10. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Propinsi DIY.....	14
Gambar 2. 10. Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah DIY	15
Gambar 2. 11. Rencana Pemanfaatan Lahan di DIY	16
Tabel 2. 10. (lanjutan)	17
Tabel 2. 11. Gabungan Komponen Kependudukan dan Perekonomian Propinsi Jawa Tengah	20
Tabel 2. 12. Gabungan Komponen Kependudukan dan Perekonomian Propinsi DI Yogyakarta	20
Tabel 2. 13. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Propinsi Jawa Tengah.....	21

Tabel 2. 14.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Propinsi Di Yogyakarta	22
Tabel 2. 15.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Propinsi Di Yogyakarta	23
Tabel 2. 16.	Analisis Tipologi Klaasen untuk wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta	24
Tabel 2. 17.	Pengelompokan Wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta.....	24
Tabel 2. 18.	Analisis Tipologi Klaasen untuk wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta	25
Tabel 2. 19.	Pengelompokan Wilayah dalam Prop. DI Yogyakarta	25
Tabel 2. 20.	Index Williamson untuk wilayah yang berbatasan dengan Prop. DI Yogyakarta	26
Tabel 2. 21.	Index Williamson untuk wilayah di Prop. DI Yogyakarta	27
Tabel 2. 22.	Gambaran kabupaten/kota Jateng disekitar Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IPM	28
Tabel 2. 23.	Gambaran kabupaten/kota Jateng di Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IPM	29
Tabel 2. 24.	Gambaran Kabupaten/kota Jateng disekitar Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IKM	30
Tabel 2. 25.	Gambaran kabupaten/kota di Propinsi DIY atas dasar faktor penyusun IKM .	31